

SKRIPSI
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing:

Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.
Almh. Henny Andriani, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No.Reg : 03/PK-V/V/2025

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM

ABSTRAK

Kedudukan dan peran keterangan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi, serta korelasinya terhadap putusan Mahkamah, menjadi fokus penelitian ini. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang dapat memberikan penjelasan ilmiah atas isu-isu teknis dan hukum yang muncul dalam perkara perselisihan hasil Pemilu. Namun, dalam praktiknya, keberadaan dan kontribusi keterangan ahli dalam putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi perdebatan, mengingat tidak semua keterangan ahli dijadikan dasar pertimbangan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. bagaimana kedudukan dan peran keterangan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2. bagaimana korelasi antara keterangan ahli dengan putusan hakim dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2004 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah dan memiliki peran strategis dalam menjembatani aspek teknis maupun hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertimbangan Mahkamah, terutama ketika memperkuat bukti surat dan keterangan saksi. Hal ini semakin terlihat dalam perkara PHPU Legislatif, DPD, maupun Pilkada, di mana Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon, baik berupa penghitungan ulang maupun pemungutan suara ulang, dengan mempertimbangkan keterangan ahli yang memperkuat bukti lain. Dalam PHPU Presiden, pengaruh keterangan ahli memang diposisikan secara variatif, namun tetap memiliki signifikansi penting karena mampu memperkuat dalil pemohon, terutama ketika keterangan tersebut disusun secara sistematis, berbasis data empiris, dan relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian, keterangan ahli akan memberikan kontribusi nyata apabila mampu menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas dan relevan terhadap pokok perkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan peran keterangan ahli dalam sistem pembuktian hukum acara di Mahkamah Konstitusi, sekaligus mendorong tercapainya keadilan materil dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu.